

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jakarta merupakan Ibu Kota Negara Indonesia yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian di Indonesia. Jakarta merupakan perwajahan dari Indonesia sehingga fasilitas, pelayanan, dan pembangunan di Jakarta lebih maju dibanding dengan daerah lain di Indonesia, terlebih saat Orde Baru diterapkannya pembangunan terpusat yang memusatkan pembangunan di Jakarta sebagai kota Internasional guna menyokong kegiatan pemerintahan hingga perekonomian. Perkembangan lebih dulu yang dialami Jakarta menjadikannya sebagai kota yang menjanjikan untuk mengadu nasib dan mencari peruntungan baru bagi para masyarakat di luar Jakarta dan mereka memiliki persepsi bahwa lapangan pekerjaan terbuka luas di Ibu Kota. Perpindahan yang dilakukan masyarakat dari daerah luar DKI Jakarta ke Jakarta yaitu untuk memperbaiki taraf perekonomian dan status sosial keluarga tanpa memikirkan risiko apa saja yang mungkin dapat terjadi ketika mereka sudah meninggalkan kampung halaman dan memutuskan menetap. Tanpa disadari ribuan masyarakat Indonesia memiliki pemikiran yang sama seperti ini dan mereka bersaing mengadu nasib di DKI Jakarta.

Tabel 1. 1

Penduduk Pendatang Dari Luar Provinsi DKI Jakarta 2020

No	Bulan	Jumlah Penduduk
1	Januari	13.360
2	Februari	11.888
3	Maret	7.421
4	April	2.288
5	Mei	3.248
6	Juni	20.762
7	Juli	13.376
8	Agustus	11.000
9	September	10.990
10	Oktober	8.849
Total		103.146

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta

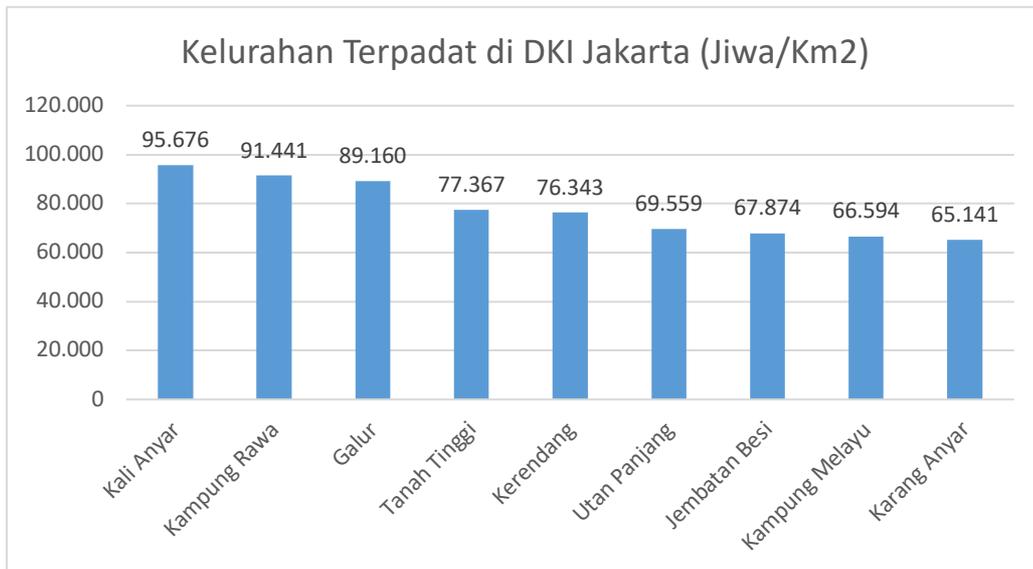
Perpindahan penduduk ke DKI Jakarta didominasi oleh penduduk wanita sebesar 52% dan penduduk laki-laki sebesar 48%. Pada tahun 2020 terdapat lonjakan penduduk pendatang sebesar 538% pada bulan Juni jika dibandingkan dengan bulan Mei.

Dari banyaknya individu yang melakukan urbanisasi timbul permasalahan lain di kota yang dijadikan tempat urbanisasi. Perpindahan penduduk ini mengakibatkan daerah yang menjadi tujuan urbanisasi terlebih Jakarta mengalami peningkatan jumlah penduduk, hal ini berdampak pada ketersediaan lahan yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal atau permukiman Jakarta.

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan sensus penduduk yang menunjukkan hasil bahwa jumlah penduduk DKI Jakarta pada September 2020 sebesar 10,56 juta

dengan konsentrasi penduduk terbesar DKI Jakarta terdapat pada Kotamadya Jakarta Timur sebesar 3,04 jiwa atau 28,76% dari total seluruh penduduk DKI Jakarta dengan begitu maka kepadatan penduduk DKI Jakarta sebanyak 15,906 ribu jiwa per Km².

Diagram 1.1
Kelurahan Terpadat di DKI Jakarta



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Pada 2020 terdapat sepuluh kelurahan terpadat di Jakarta yaitu Kelurahan Kali Anyar, Kampung Rawa, Galur, Tanah Tinggi, Kerendang, Utan Panjang, Jembatan Besi, Keagungan, Kapung Melayu, dan Karang Anyar. Berdasarkan diagram 1.1 lima kelurahan terpadat berada di Jakarta Pusat, empat kelurahan di Jakarta Barat, dan satu kelurahan di Jakarta Timur, selain itu terdapat 159 dari 267 kelurahan atau sebesar 60% kelurahan di DKI Jakarta turut memiliki kepadatan penduduk di atas rata-rata.

Para pendatang baru di Jakarta tentunya memiliki kebutuhan akan tempat tinggal sehingga mereka akan melakukan hampir berbagai cara agar mendapatkan tempat tinggal. Berbagai tempat yang diperuntukan ruang terbuka hijau pada akhirnya ditempati oleh para pendatang baru ini dengan membangun rumah illegal, seadanya bahkan semi permanen. Lebih memprihatinkan lagi dengan ketersediaan lahan yang terbatas namun kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang sangat tinggi menimbulkan perumahan padat dan kumuh yang kurang memperhatikan aspek lingkungan. Membangun rumah tanpa memperhatikan sistem sanitasi, drainase, pembuangan sampah, dan luas jalan serta membangun rumah di pinggir sungai, di pinggir rel kereta, bahkan di tanah pemerintah. Para pendatang yang memprakarsai keberadaan kawasan kumuh ini menggantungkan hidupnya pada lingkungan tersebut dan membentuk keluarga, ditambah arus urbanisasi yang tinggi mengakibatkan kawasan permukiman kumuh semakin padat sehingga keberadaan kawasan kumuh terus berkembang, turun-temurun, dan kekal. Permasalahan permukiman kumuh erat kaitannya dengan kemiskinan. Salah factor adanya permukiman kumuh ialah kemiskinan.

Gambar 1. 1

Profil Kemiskinan DKI Jakarta Tahun 2020



Sumber : Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Di Jakarta dalam kurun waktu enam bulan dari bulan Maret 2020 hingga September 2020 telah terjadi penambahan 15.980 penduduk miskin, bagi penduduk sangat miskin bertambah 76.500 orang. Kemiskinan ini bertambah 0,16% jika dibandingkan dengan Maret tahun 2020. Penduduk miskin Jakarta juga masih berada dalam perangkap demografi. Mereka yang rentan dan berada dalam kategori ini adalah rumah tangga dengan Kepala Rumah Tangga (KRT) berusia tidak produktif (diluar 15-64 tahun), rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang tinggi, dan tingkat pendidikan KRT yang rendah. Hal ini mengakibatkan sulitnya bagi penduduk miskin bertahan ataupun berjuang untuk menjadi tidak miskin.

Keterkaitan ini karena para penduduk yang melakukan urbanisasi tidak dibekali dengan persiapan yang matang dari daerah asalnya baik dari finansial maupun pendidikan dan *skill* yang dimiliki mengakibatkan para individu tersebut kalah dari persaingan pasar kerja. Para pendatang yang tidak memiliki modal yang banyak memilih untuk tinggal di kawasan kumuh karena murah biaya sewa tempat. Bagi individu yang tidak lolos persaingan kerja, untuk melanjutkan kehidupan mereka memilih sektor informal dan bekerja sebagai pemulung, asisten rumah tangga, pengamen dan sopir ojek. Penghasilan yang rendah memaksa mereka untuk tetap tinggal di kampung-kampung kumuh atau permukiman liar. Pendapatan yang terbatas serta pendidikan dan kemampuan yang dimiliki sangat minim memaksa mereka berada pada lingkaran tersebut. Jika pertumbuhan lingkungan permukiman kumuh ini dibiarkan, derajat kualitas hidup masyarakat miskin akan tetap rendah. Memberi peluang tindakan kriminalitas, terganggunya norma tata susila, tidak teraturnya tata guna tanah dan sering menimbulkan banjir yang akhirnya menimbulkan degradasi lingkungan yang semakin parah.

Dampak dari adanya permukiman kumuh cukup banyak, salah satunya aspek lingkungan. Keberadaan permukiman kumuh ini memiliki pengaruh terhadap keseimbangan lingkungan karena banyak permukiman kumuh dibangun diatas tanah yang diperuntukan sebagai lahan resapan air atau bantaran sungai yang sejatinya memang tidak diperbolehkan untuk membuat bangunan di atasnya. Tidak ada sistem drainase pada mayoritas perkampungan kumuh dapat menyebabkan pencemaran lingkungan sebab air yang dibuang ke tanah kembali ke permukaan tanah. Apabila masyarakat membuang kotoran maka kotoran tersebut dapat saja

kembali lagi ke permukaan, dengan begitu tidak hanya mencemari air namun tanah dan lingkungan di permukiman tersebut tercemar.

Pencemaran lingkungan lainnya diakibatkan oleh membuang sampah tidak pada tempatnya. Mayoritas dari penduduk permukiman kumuh tidak mengolah kembali sampah dan langsung membuangnya ke sungai. Apabila sampah yang dibuang adalah sampah organik maka sampah tersebut akan terurai namun bagaimana sampah yang dibuang adalah sampah plastik? sudah pasti sampah tersebut akan mencemari lingkungan. Selanjutnya masalah lingkungan pada permukiman kumuh adalah sirkulasi udara yang buruk. Keberadaan rumah-rumah di dalam permukiman kumuh yang saling berdempetan ditambah ventilasi udara di yang tidak memadai menyebabkan udara pada lingkungan itu hanya berputar di lingkungan itu saja. Hal ini tidak baik karena dapat memicu berbagai penyakit dan tumbuhnya jamur yang dapat mengancam kesehatan. Pencemaran lingkungan dan sirkulasi udara yang buruk mengakibatkan para penduduk di permukiman kumuh dapat terkena penyakit menular.

Pada tahun 2018 dikeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat yang di dalamnya memuat penetapan tugas dan tanggung jawab bagi *stakeholders* yang akan menangani penataan kampung dan masyarakat serta penetapan 21 kampung.

Tabel 1.2**Penetapan Lokasi Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat**

No	Nama Kampung	RT	RW	Kelurahan	Kecamatan	Kota
1	Lodan	4	1	Ancol	Pademangan	Jakarta Utara
2	Tongkol	4	1	Ancol	Pademangan	Jakarta Utara
3	Krapu	8 s.d. 9	1	Ancol	Pademangan	Jakarta Utara
4	Walang	Blok A dan Blok B		Ancol	Pademangan	Jakarta Utara
5	Muka	1 s.d. 9	4	Ancol	Pademangan	Jakarta Utara
6	Akuarium	12	4	Penjaringan	Penjaringan	Jakarta Utara
7	Marlina	1 s.d. 4 dan 8 s.d. 11	17	Penjaringan	Penjaringan	Jakarta Utara
8	Elektro	5 s.d.7 dan 12 s.d. 11	17	Penjaringan	Penjaringan	Jakarta Utara
9	Gedong Pempa	20	17	Penjaringan	Penjaringan	Jakarta Utara
10	Blok Empang	1 s.d. 5 dan 7 s.d. 10	22	Pluit	Penjaringan	Jakarta Utara
11	Kerang Ijo	6	22	Pluit	Penjaringan	Jakarta Utara
12	Baru Tembok Bolong	11	22	Pluit	Penjaringan	Jakarta Utara
13	Tanah Merah	1 s.d. 9	22	Kelapa Gading Barat	Kelapa Gading	Jakarta Utara

		1 s.d. 21	7	Tugu Selatan	Koja	Jakarta Utara
		1 s.d. 12	8	Rawa Badak Selatan	Koja	Jakarta Utara
No	Nama Kampung	RT	RW	Kelurahan	Kecamatan	Kota
	Tanah Merah	1 s.d. 12	9	Rawa Badak Selatan	Koja	Jakarta Utara
		1 s.d. 11	10	Rawa Badak Selatan	Koja	Jakarta Utara
		1 s.d. 3	11	Rawa Badak Selatan	Koja	Jakarta Utara
14	Prumpung	1 s.d. 12	2	Cipinang Besar Utara	Jatinegara	Jakarta Timur
15	Rawa Barat	15 s.d. 16	4	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	Jakarta Barat
16	Rawa Timur	1	5	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	Jakarta Barat
17	Guji Baru	4 s.d. 7	2	Duri Kepa	Kebon Jeruk	Jakarta Barat
18	Kunir	4	6	Pinangsia	Taman Sari	Jakarta Barat
19	Kali Apuran	9 dan 13	7	Kedaung Kali Angke	Cengkareng	Jakarta Barat
20	Sekretaris	15	7	Tanjung Duren Utara	Grogol Petamburan	Jakarta Barat
21	Baru	1 s.d. 6 dan 13 s.d. 17	5	Pondok Pinang	Kebayoran Lama	Jakarta Selatan

Sumber: Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018

Tabel 1.2 merupakan daftar kampung yang akan dilaksanakan penataan permukiman dan masyarakat di DKI Jakarta. Perbaikan kondisi permukiman kumuh dan peningkatan kualitas masyarakat masih terpusat pada wilayah Jakarta Utara, dari 21 kampung yang telah ditetapkan sebanyak 13 kampung berada pada Jakarta Utara, enam kampung berada di Jakarta Barat, dan masing-masing satu kampung di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

Pada tahun 2018 juga dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu yang memuat bahwa pelaksanaan perbaikan permukiman dan peningkatan kualitas masyarakat dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu *Community Action Plan*, *Collaborative Implementation Program*, dan *monitoring and evaluation*. Program ini dinaungi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta dan pelaksanaan program ini menitikberatkan kepada partisipasi masyarakat atas pembangunan permukiman. Partisipasi masyarakat disini maksudnya ialah pembangunan permukiman ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik asli kampung tersebut melalui penyerapan aspirasi dari warga local sehingga masyarakat juga turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan agar perbaikan permukiman tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Program ini dibentuk sebagai jawaban dari masalah permukiman kumuh serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di DKI Jakarta. Tujuan dilaksanakannya program ini adalah terpenuhinya kebutuhan hunian yang layak dan keamanan bermukim bagi masyarakat kampung, pemenuhan prinsip

kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan selanjutnya adalah peningkatan layanan sarana dan prasarana permukiman, dan terpenuhinya aksesibilitas dan fasilitas publik. Keberadaan peningkatan kualitas masyarakat dari aspek sosial dan ekonomi memiliki harapan ketika permukiman mereka sudah tidak kumuh dan dibangun kembali, masyarakat setempat kelak dapat mengelola permukiman tersebut, sehingga tercipta *sustainably*. Karena tidak selamanya masyarakat dapat mengandalkan bantuan dari pemerintah, masyarakat diberikan pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas hidup melalui aspek sosial dan ekonomi dengan harapan dapat menciptakan kemandirian serta memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat kampung perkotaan dan dapat keluar dari kemiskinan.

Program ini pertama kali diimplementasikan pada Kampung Akuarium, Jakarta Utara yang sebelumnya digusur oleh Bapak Basuki Tjahaja Purnama dengan maksud revitalisasi cagar budaya. Hingga tahun 2020 pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat dari 21 kampung baru terlaksana di Kampung Akuarium hingga tahap pembangunan. Hal ini tentunya berbeda dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan dokumen RPJMD DKI Jakarta pada 2018-2022 di laman resmi Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta terdapat target penataan kampung kumuh di Jakarta. Target pada tahun 2018 sebanyak 10 RW ditata, pada 2019 terdapat target sebanyak 40 RW, kemudian target di tahun 2020 sebanyak 56 RW, pada tahun 2021 sebanyak 46 RW, dan pada tahun 2022 sebanyak 48 RW dengan

total keseluruhan sebanyak 200 RW menjadi target sasaran implementasi CAP dari tahun 2018-2022.

Digusurnya Kampung Akuarium menyebabkan masyarakat tidak memiliki hunian permanen, oleh karena itu untuk sementara waktu masyarakat Kampung Akuarium dibuatkan *shelter*, namun shelter yang terbangun tidak memperhatikan kelayakan bangunan seperti minimnya ventilasi udara, sulitnya cahaya matahari masuk pada lingkungan shelter, serta kecilnya jalan lingkungan.

Gambar 1. 2
Shelter Kampung Akuarium



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021

Pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat di Kampung Akuarium dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu *Community Action Plan (CAP)*, *Collaborative Implementation Program (CIP)*, dan *Monitoring and Evaluation*. Pada pelaksanaan tahap pertama yaitu *Community Action Plan* terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan seharusnya dengan yang terlaksana. Pembuatan desain pada tahap *Community Action Plan* yang dilaksanakan tahun 2018 seharusnya dibuat oleh konsultan terpilih sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk menjalankan peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat, namun desain yang dibuat oleh konsultan ditolak oleh masyarakat dan masyarakat membuat desain permukimannya sendiri bersama para pendamping yaitu Rujak *Center for Urban Studies*, *Urban Poor Consortium*, dan Jaringan Rakyat Miskin Kota.

Setelah dilaksanakan *Community Action Plan* tahap selanjutnya ialah *Collaborative Implementation Program* yaitu pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat berdasarkan rencana yang sudah dibuat pada tahap *Community Action Plan*, pelaksanaan rencana pada CIP tidak terbatas pada aspek fisik saja namun turut aspek social dan budaya. Di Kampung Akuarium tidak terlaksana CIP sebab pelaksanaan CIP terbatas pada lingkungan yang telah memiliki hunian sedangkan Kampung Akuarium tidak memiliki hunian permanen. Perwujudan dari rencana yang dibuat pada tahap CAP tetap dijalankan namun dengan nama yang berbeda yaitu pembangunan, pembangunan aspek fisik, social, dan ekonomi. Pelaksanaan CIP seharusnya dilaksanakan setahun setelah pelaksanaan CAP tetapi di Kampung Akuarium pembangunan aspek fisik, social, dan ekonomi baru dilaksanakan pada tahun 2020 atau dua tahun setelah

pelaksanaan *Community Action Plan*. Kesenjangan pada tahap pembangunan aspek fisik, social, dan ekonomi turut terjadi dalam perwujudan perencanaan yang baru melaksanakan pembangunan pada aspek fisik dan belum dilaksanakannya peningkatan kualitas masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan social budaya dan ekonomi. Jika melihat maksud dari pelaksanaan program ini dan sejarah yang dimiliki Kampung Akuarium, masyarakat Kampung Akuarium membutuhkan kegiatan yang dapat meningkatkan kondisi social dan ekonomi mereka, sebab setelah dilakukan penggusuran masyarakat Kampung Akuarium tidak hanya kehilangan tempat tinggal tetapi juga kehilangan pekerjaan yang memiliki dampak sulitnya memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana implementasi peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat di Kampung Akuarium sebagai kampung pertama yang menjalankan program ini hingga tahun 2020 dari 21 kampung yang ditargetkan serta tidak berjalannya aspek social dan ekonomi yang sebenarnya masyarakat membutuhkan peningkatan kualitas hidup setelah mengalami penggusuran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah

1. Bagaimana implementasi peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat di Kampung Akuarium, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara?
2. Apa saja factor pendorong dan penghambat dalam implementasi peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat di Kampung Akuarium, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini ialah

1. Untuk menganalisis implementasi pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat di Kampung Akuarium, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara.
2. Untuk menganalisis factor pendorong dan penghambat dalam implementasi peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat di Kampung Akuarium, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna :

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah nilai untuk pengembangan ilmu pengetahuan terlebih pada bidang Adminsitration Publik, serta melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang serupa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah provinsi DKI Jakarta sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam perbaikan kawasan kumuh di Jakarta.

- b. Untuk pihak-pihak yang membutuhkan

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan atau *input* dalam pelaksanaan program peningkatan kawasan permukiman kumuh maupun program serupa sehingga mendapatkan solusi terbaik.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membantu peneliti untuk melihat perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan mengenai penggunaan *Community Action Plan* dalam penataan kawasan kumuh. Di bawah ini merupakan tabel penelitian terdahulu.

Tabel 1.5
Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Lokus Penelitian	Temuan Utama	Kelemahan	Kelebihan
Rusy, Fathy, dan Jalu Lintang Yogiswara Anugrah dengan judul " <i>Community Action Plan</i> (CAP) dan Kamung Improvement Program : Studi Komparatif Kebijakan Inklusif Tata Ruang Permukiman di Surabaya dan Jakarta"	Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan metode desk review dalam pengumpulan data	DKI Jakarta dan Surabaya	Penelitian ini mengomparasikan Program CAP dengan KIP sebagai kebijakan tata ruang permukiman. Pada program CAP pemerintah melibatkan warga Kampung Akuarium dalam tahap perencanaan awal dalam bentuk musyawarah. Hingga penelitian ini dibuat dalam pelaksanaan Program CAP ditemui kendala seperti kegagalan fasilitator menggali ide untuk penataan kampung. Program KIP turut melibatkan masyarakat di dalamnya, peran masyarakat sebagai pendana sekaligus turut terlibat di dalam pembangunan kamung tersebut. Program Kampung Improvement Program dapat dikatakan berjalan dengan sangat baik melihat Kamung Gundih, Kampung Maspati, dan Kampung Genteng dapat menjalankan program sesuai dengan arahan yang melibatkan masyarakat dalam melestarikan kampungnya. Latarbelakang masyarakat mempengaruhi keberhasilan program ini di Surabaya masyarakat	Kekurangan pada penelitian ini ialah penjelasan studi kasus yang singkat pada kota-kota di Surabaya. Tidak disertakan indikator penilaian komparasi antara Program CAP dan KIP sehingga pada penelitian ini terlihat kesenjangan dalam penyajian data di mana program CAP di Jakarta baru saja akan berjalan sehingga peneliti tidak menjelaskan secara rinci bagaimana	Penelitian ini dapat memberikan pertimbangan untuk cukup berhati-hati dalam menerapkan program CAP di Jakarta sebabdibutuhkan pendekatan yang baik serta kepedulian masyarakat agar program dapat berjalan

			menengah ke bawah relatif pendatang baru yang memiliki latar belakang yang tidak terlalu berbeda, beda halnya pada Jakarta. Sehingga untuk mengimplementasikan program ini perlu diperhatikan karakteristik masyarakatnya.	penerapan program ini di Jakarta tidak seperti Program KIP di Surabaya. Pada penelitian ini pula tidak dijelaskan perbedaan mendasar antara Program CAP dan KIP.	
Muhtadi dan Alvin Anggara (2019) dengan judul "Evaluasi Proses <i>Program Community Action Plan</i> Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan di Kampung Akuarium Jakarta Utara"	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif	Kampung Akuarium Jakarta Utara	Pengukuran ini menggunakan empat kriteria evaluasi yaitu standar praktik terbaik, kebijakan lembaga, tujuan proses, dan kepuasan klien. 1. Standar praktik terbaik. Program ini memiliki dua tujuan yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Pada penelitian ini fokus evaluasi program CAP adalah jangka pendek berupa pembangunan fasilitas fisik, sementara itu jangka panjang program ini ialah pembangunan hunian permanen dan pengadaan jaringan listrik. Evaluasi program ini menggunakan indikator SOP dan standar sosialisasi program. Berdasarkan indikator SOP,	Penelitian ini terbatas hanya sampai evaluasi program CAP jangka pendek	Penulisan penelitian ini sudah baik karena sistematis dengan mengikuti metode penelitian yang peneliti gunakan sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai evaluasi keberjalanan Program CAP.

			<p>terdapat beberapa aspek yang tidak dapat dicapai dalam waktu dekat karena melihat kondisi Kampung Akuarium yang baru saja mengalami penggusuran seperti belum terlaksana pembangunan hunian permanen, tidak adanya drainase, belum ada pembangunan jalan lingkungan beraspal, dan tidak adanya teknologi ramah lingkungan. Meskipun begitu pembangunan aspek fisik lingkungan sudah terlaksana sebanyak 9 dari 12.</p> <p>Indikator standar sosialisasi program ialah pengenalan <i>Program Community Action Plan</i> , kegiatan ini telah sesuai dengan arahan yang terdapat dalam dokumen petunjuk pelaksana program CAP.</p> <p>2. Kebijakan lembaga.</p> <p>a. Klien atau penerima manfaat program. Penerima manfaat program ini ialah seluruh masyarakat Kampung Akuarium Jakarta Utara.</p> <p>b. Sumber daya manusia. Program membutuhkan sumber daya manusia dengan latar belakang yang berbeda sehingga akan menciptakan sistem kolaborasi yang baik</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>antara masyarakat dengan pemerintah maupun antar instansi pemerintah</p> <p>3. Tujuan proses. Program CAP memiliki tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Untuk tujuan jangka panjang belum terlaksana karena masih tahap perencanaan.</p> <p>4. Kepuasan klien. Kepuasan klien berarti tanggapan positif dan negatif dari masyarakat sasaran.</p> <p>a. Ketanggapan. Para implementor program ini memiliki ketanggapan yang baik dalam memberikan bantuan dan masyarakat cukup puas.</p> <p>b. Bukti fisik. Sudah terdapat pembangunan fisik di Kampung Akuarium yaitu <i>shelter</i> dan kamar mandi komunal.</p> <p>c. Empati. masyarakat merasakan kepedulian yang diberikan oleh petugas cukup tinggi.</p>		
Sinta Eka Marlina, Yusuf Fadli, dan Arif Ginanjar dengan judul "Model	Penelitian ini menggunakan metode paradigma konstruktifis	Kampung Akuarium Jakarta Utara	Pada penelitian ini pola kolaborasi yang terjadi adalah negosiasi, warga lokal Kampung Akuarium dapat memberikan aspirasi kepada pemerintah dan pemerintah mendengarkan serta menjalankan aspirasi dari warga	Pada penelitian ini aktor kolaborasi tidak memuat aktor dari organisasi publik namun lebih	Kelebihan pada penelitian ini menjelaskan mendetail mengenai

<p>Kolaborasi Pembangunan Kawasan Perkotaan : Implementasi CAP Dalam Penataan Kampung Akuarium"</p>	<p>dengan pendekatan metode kualitatif</p>		<p>Kampung Akuarium sehingga dalam paradigma pembangunannya tidak hanya terjadi top down namun turt terjadi bottom up. Adapun aktor aktor yang berperan dalam program ini yaitu Rujak Center for Urban Studies (RCUS) merupakan organisasi non pemerintahan yang mendampingi masyarakat mengenai permasalahan permukiman, dalam hal ini memfokuskan terhadap pendampingan masyarakat Kampung Akuarium untuk mempersiapkan teknis CAP. Selanjutnya terdapat Urban Poor Consortium (UPC), merupakan organisasi non pemerintahan yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama cara kerja UPC yaitu dengan bekerjasama dengan komunitas marjinal perkotaan melalui pendekatan holistik dan partisipatoris. Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta, merupakan organisasi non pemerintahan yang melakukan pendampingan kepada warga marjinal melalui organizing, advocating, dan networking, dan aktor terakhir yaitu lembaga bantuan hukum Jakarta yang memiliki peran dalam proses CAP dalam hal riset sertifikasi status tanah warga.</p>	<p>berfokus pada NGO yang membantu dalam tahap perencanaan dan pembuatan CAP serta dalam penulisannya tidak terlalu dikaitkan ke dalam indikator-indikator teori yang peneliti gunakan</p>	<p>kolaborasi yang terjadi dan peran apa saja dari aktor-aktor tersebut hingga sejarah singkat mengenai LSM yang terlibat</p>
---	--	--	---	--	---

			Setiap aktor yang berperan menciptakan harmonisasi di mana para aktor dapat sama-sama mengawasi jalannya penataan Kampung Akuarium.		
Ayuni M. Riadin, Toddy Aditya, dan Nurhakim dengan judul "Evaluasi <i>Program Community Action Plan</i> (CAP) Dalam Penataan Kampung Kumuh DKI Jakarta (Studi Kasus Kampung Bukit Duri Jakarta Selatan)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif	Kampung Bukit Duri Jakarta Selatan	Kurangnya koordinasi serta peranan dari pihak pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendamping menyebabkan <i>Program Community Action Plan</i> (CAP) tidak berhasil diimplementasikan ke masyarakat Bukit Duri dan belum dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kawasan pemukiman di DKI Jakarta.	Penggunaan informasi yang berulang sehingga informasi yang ditemukan di dalam jurnal terbatas. Penggunaan kalimat yang berulang hanya menjelaskan fenomena tanpa mengaitkan dengan metode penelitian	Penulisan jurnal menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sehingga isi jurnal dapat tersampaikan dengan baik.
Ardila Muslim (2020) dengan judul " <i>Community Action Plan</i>	Pendekatan kualitatif	-	pada dasarnya CAP merupakan sebuah proses memahami dan mengatasi sebuah masalah secara bersama untuk membangun kembali kehidupan masyarakat di wilayah ter dampak. Dalam	Tidak terdapat lokus yang jelas atau lokus yang membandingkan penerapan	Pada penelitian ini sudah menjelaskan secara jelas penerapan CAP dan hubungannya

<p>Dalam Penataan Kawasan Kumuh Dari Perspekti <i>Good Urban Governance</i> : Sebuah Tinjauan Literatur"</p>			<p>proses penyelesaian masalah hingga solusinya, metode ini beroperasi dari tingkatan masyarakat bawah (bottom-up), dari kelompok komunitas warga terdampak itu sendiri dan berbagai aktor yang terlibat. Namun para aktor yang terlibat dalam metode CAP ini adalah bagian dari kerangka kerja yang perlu dukungan melalui program kegiatan pemerintah, sebagai bentuk perbaikan masalah sosial yang terjadi. Ketika pelaksanaannya berhasil mengkonfirmasi empat domain ketegangan dan tantangan penilaian good urban governance maka yang terjadi ialah tindakan penyeimbang dari berbagai hal penanganan masalah sosial yang menjadi sebuah tujuan dari kualitas tata kelola pemerintahan kota</p>	<p><i>Community Action Plan</i></p>	<p>dengan perspektif Good Urban Governance, terdapat irisan antara indikator CAP dengan Good Urban Governance diantaranya : a. Tanggung jawab dan akuntabilitas b. Representasi c. Akses dan kekuatan d. Legitimasi dan efektivitas</p>
<p>Alfian Nurdiansya (2018), "<i>Urban Slum Upgrading Policy in Jakarta (Case Study : Kampung Deret</i></p>	<p>Metode penelitian kuantitatif</p>	<p>Petogogan dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan</p>	<p>Pada penelitian ini ditemukan hambatan teknis bagi para pelaku kebijakan Program Kampung Deret (PKD). Pelaksanaan PKD di Petogogan cukup berhasil jika dibandingkan dengan PKD Pasar Minggu dalam pembangunan perumahan, fasilitas saran dan prasarana dasar, dan jaminan kepemilikan. Implementasi program ini dapat dikatakan berhasil merujuk pada</p>	<p>Pada jurnal ini tidak terlalu banyak memaparkan mengenai teori-teori yang digunakan meskipun begitu peneliti telah memaparkan</p>	<p>Penelitian ini mencantumkan beberapa peta, seeperti pemekaran permukiman kumuh di Jakarta, denah lokasi penerapan PKD di Petogogan. Pada penelitian ini juga</p>

<i>Program Implementation)</i>			pendekatan setara berdasarkan karakteristik objek kebijakan dan penghuni permukiman kumuh di setiap permukiman kumuh yang telah ditetapkan. Program PKD memiliki rangkaian program yaitu PKD I, PKD II, dan PKD III. Rangkaian program ini dapat dikatakan efektif untuk menangani perbaikan permukiman kumuh karena dapat meminimalisasi pertentangan dan memaksimalkan partisipasi dari masyarakat permukiman kumuh.	indikator penelitian yang digunakan. Sayangnya jurnal ini terbit saat program ini sudah tidak digunakan lagi di Jakarta.	dijelaskan mengenai peran pemerintah dan <i>stakeholders</i> yang berperan di dalam program ini beserta kegiatan, <i>input</i> , proses, dan <i>output</i> yang dihasilkan dari kolaborasi yang diciptakan. Pada penelitian ini turut dipaparkan mengenai kondisi sebelum dan sesudah diterapkannya program ini baik secara tabel maupun berbentuk gambar.
José Rafael Núñez Collado dan Han-Hsiang Wang (2020), " <i>Slum Upgrading and Climate Change</i>	Metode penelitian kualitatif dengan studi literatur	Amerika Latin	Penelitian ini menggunakan tiga studi kasus yang berbeda. Studi kasus pertama mengenai tipologi perumahan yang dapat ditiru pada berbagai konteks informal. Studi kasus dua melihat berbagai intervensi pada suatu wilayah sebagai perwakilan suatu kota yang dapat	Penelitian ini memberikan studi kasus pada beberapa contoh penerapan perbaikan permukiman yang	Peneliti sangat memperhatikan aspek-aspek lingkungan agar terciptanya permukiman yang baik dan ramah

<p><i>Adaptation and Mitigation : Lessons from Latin America"</i></p>			<p>digunakan sebagai labolatorium untuk perencanaan kota yang inklusif. Studi kasus ketiga mengenai skema komunitas yang dapat menambah perdebatan tentang manfaat relokasi daerah informal yang sangat rentan.</p> <p>Mengenai kaitannya antara penataan permukiman kumuh dengan perubahan iklim dibutuhkan pendekatan perbaikan permukiman kumuh yang mempertimbangkan lingkungan sebab kebanyakan kebijakan mengenai permukiman kumuh tidak memperhatikan aspek lingkungan. Perencanaan kota akan memainkan peran kunci dalam perbaikan permukiman kumuh yang dicita-citakan model sebagai jalur 1,5 ° C membutuhkan transformasi yang signifikan dalam energi, pengelolaan penggunaan lahan, dan sistem transportasi. Bangunan diberikan dalam proyek perbaikan permukiman kumuh harus menggunakan teknik bioklimatis dan mengintegrasikan energi terbarukan; sistem transportasi yang disediakan harus rendah karbon; dan ruang publik harus mencakup upaya penghijauan. Panel surya</p>	<p>memperhatikan aspek lingkungan namun dalam tahap pembahasan atau diskusi tidak terlalu membahas mengenai tempat-tempat tadi dan penelitian ini lebih mengarah ke saran bagaimana seharusnya perbaikan permukiman</p>	<p>lingkungan. Peneliti jurnal ini sangat memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan penelitian dan menjelaskannya secara rinci serta kualitas gambar yang baik sehingga memberikan kenyamanan saat membaca jurnal ini.</p>
---	--	--	---	---	---

			<p>fotovoltaik (PV), misalnya, telah terbukti menjadi strategi mitigasi yang terjangkau dan efektif dalam tiga kasus yang dianalisis. Panel surya sangat efisien di negara berkembang; kebanyakan dari ini negara memiliki tingkat Iradiasi Horizontal Global (GHI) yang tinggi, oleh karena itu penggunaannya harus didorong dalam program peningkatan di masa depan. Selain itu, transportasi inovatif seperti sistem kereta gantung dan listrik bus dapat membantu secara fisik menghubungkan permukiman informal ke formal kota dengan solusi emisi karbon rendah</p>		
<p>Jonathan Simbeya Mwamba dan Zhenwei Peng (2020), <i>"Analysis of Informal Urban Settlement Upgrading : The Case of Ng'ombe Slum</i></p>	<p>Metode Penelitian Kualitatif</p>	<p>Ng'ombe, Zambia</p>	<p>Inisiatif peningkatan Ng'ombe menyatukan berbagai pemangku kepentingan yang berasal dari negara bagian, sektor swasta internasional dan lokal serta masyarakat sipil dalam upaya bersama untuk meningkatkan situasi sosial dan ekonomi masyarakat miskin perkotaan. Proyek-proyek individu dalam peningkatan dapat berhasil dilaksanakan, tetapi yang jauh lebih penting adalah apa yang terjadi ketika berbagai pemangku kepentingan telah melepaskan diri dari proyek tersebut. Skema kredit mikro</p>	<p>Jurnal ini tidak terlalu fokus pada proses implementasi, tetapi terlalu fokus terhadap bagaimana kolaborasi terhadap masyarakat, LSM, swasta, dan pemerintah dalam peran</p>	<p>Jurnal ini membahas mengenai peran dan tugas para aktor yang terlibat dan pentingnya peran mereka dalam keberjalanan kebijakan ini</p>

<p><i>Upgrading in Zambia”</i></p>			<p>masyarakat dan inisiatif pengembangan keterampilan memastikan bahwa masyarakat lokal tidak hanya diberikan infrastruktur publik, mereka juga dibekali dengan keterampilan dan keuangan yang diperlukan untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur fisik yang disediakan dapat dilakukan. dipertahankan. Untuk memastikan keberlanjutan infrastruktur masyarakat dalam jangka panjang, perlu dikembangkan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan untuk mendukung operasi dan pemeliharaan mereka seperti yang terjadi pada penataran Ngombe. Serupa dengan itu, proyek juga menekankan perlunya biaya operasi dan pemeliharaan infrastruktur yang disediakan dalam program peningkatan dengan tanggung jawab bersama antara LSM, CBO, otoritas kota, dan masyarakat. Seperti kasus dalam studi ini, dana untuk operasi dan pemeliharaan yang memadai termasuk penggantian harus dihasilkan baik melalui struktur komunitas atau dalam hubungannya dengan otoritas lokal dan struktur utilitas komersial. Pemangku</p>	<p>pemberdayaan daerah kumuh di Ng’ombe</p>	
------------------------------------	--	--	--	---	--

			<p>kepentingan yang mengelola intervensi peningkatan perlu mempertimbangkan manfaat menggabungkan elemen-elemen ini sebelum perencanaan dan implementasi dimulai. Setiap elemen yang diidentifikasi sangat penting dalam proses peningkatan. Inisiatif LSM internasional dan lokal untuk memperbaiki situasi perumahan bagi masyarakat miskin pedesaan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mengurangi masalah perumahan dan secara umum dapat meningkatkan kondisi mata pencaharian mereka. Ini dikombinasikan dengan kolaborasi negara dapat memungkinkan replikasi dan peningkatan intervensi komunitas. Perbaikan Ng'ombe memberikan bukti bahwa kaum miskin kota ketika diberikan dukungan yang diperlukan dapat melakukan investasi yang signifikan untuk memperbaiki situasi perumahan mereka.</p>		
Edi Purwanti, Agung Sugiri, dan Rony Novian (2017), " <i>Determined</i>	Metode penelitian kualitatif, studi dokumen,	Nanga Bulik, Kalimantan Tengah	<p>Temuan dalam jurnal ini adalah partisipasi masyarakat dalam program ini sangat baik hingga melampaui indikator yang ada. Dalam penelitian ini partisipasi masyarakat jelas terlihat seperti masyarakat berupaya</p>	<p>Pada penelitian ini indikator perbaikan permukiman yang</p>	<p>Terdapat hasil survei yang dimuat secara mendetil mengenai kondisi permukiman.</p>

<p><i>Slum Upgrading : A Challenge to Participatory Planning in Nanga Bulik, Central Kalimantan, Indonesia"</i></p>	<p>observasi lapangan, dan FGD.</p>		<p>untuk memahami dan menilai permukimannya, menumpulkan informasi dari berbagai aspek, dan berbagai kegiatan lainnya.</p>	<p>digunakan namun tidak menjabarkannya secara detil</p>	<p>Sangat membahas mengenai partisipasi masyarakat bahkan menyertakan potongan hasil wawancara</p>
<p>Esther Y. Danso-Wiredu dan Emmanuel Midheme (2017), <i>"Slum Upgrading in Developing Countries: Lessons From Ghana and Kenya"</i></p>	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>Ghana dan Kenya</p>	<p>Tidak banyak program perbaikan permukiman kumuh yang diimplementasikan di Ghana. Salah satu program perbaikan permukiman kumuh di Ghana adalah Proyek Perumahan dan Infrastruktur Amui Dzor. Proyek ini berhasil membangun hunian permanen tiga lantai dengan 15 unit komersial, 31 apartemen, 12 tempat duduk umum, dan toilet yang dikelola koperasi. Proyek ini dapat dikatakan berhasil sayangnya proyek ini tidak diimplementasikan di daerah lain di Ghana.</p> <p>Kenya telah memiliki sejarah panjang dalam melakukan perbaikan daerah kumuh yang berasal dari masa kolonial. Contoh perbaikan pemukiman Kambi Moto termasuk dalam kategori proyek</p>	<p>Pada jurnal ini ketika membahas dua negara, Ghana dan Kenya, peneliti lebih banyak membahas mengenai sejarahnya disbanding dengan kebijakan perbaikan permukiman kumuh</p>	<p>Pada jurnal ini dibahas aspek lain seperti keamanan kepemilikan tanah di Amui Djor dan Kambi Moto, kemitraan dan inklusi sosial, kekhususan dan percontohan, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil</p>

			<p>perbaikan kawasan kumuh seperti yang dilakukan oleh Amuir Djor, dipelopori oleh masyarakat bekerja sama dengan LSM tetapi dilaksanakan melalui negosiasi terstruktur dengan pemerintah.</p> <p>Keterlibatan pemerintah sangat penting dalam proyek peningkatan negara mana pun. Proyek Amui Dzor sejak awal melibatkan GHAFUP, yang berkolaborasi dengan negara bagian selama proses berlangsung. Mereka bernegosiasi dengan dewan adat untuk mengamankan tanah untuk proyek dan terlibat dalam menyatukan pemangku kepentingan lainnya.cKasus Kenya juga menunjukkan kemitraan yang kuat antarpemerintah dan masyarakat sipil dalam melakukan perbaikan permukiman. Tidak seperti perbaikan permukiman di masa lalu, di mana negara atau LSM berusaha bekerja secara independen dengan masyarakat yang terkena dampak.</p>		
--	--	--	--	--	--

Sumber: Diolah Peneliti Dari Berbagai Jurnal, 2021

Berdasarkan penelitian terdahulu yang terdapat pada tabel 1.5 penelitian mengenai Kampung Akuarium belum terlalu banyak diteliti, hingga saat ini baru terdapat penelitian mengenai perbandingan *Program Community Action Plan* dan KIP, mengenai evaluasi program CAP namun program ini belum sepenuhnya selesai, membahas mengenai kolaborasi, evaluasi program CAP namun di tempat yang berbeda yaitu Kampung Bukit duri, dan tinjauan literatur mengenai penataan kawasan permukiman kumuh dari perspektif *good urban governance*. Hingga saat ini belum adanya penelitian mengenai implementasi peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat di Kampung Akuarium dan berdasarkan penelitian sebelumnya belum ada yang membahas dari sisi pemerintah, mayoritas membahas bagaimana peran lembaga swadaya masyarakat turut membantu perbaikan permukiman. Jika melihat penelitian terdahulu dari internasional, sudah ada program yang serupa dengan program perbaikan permukiman menggunakan *Community Action Plan*, beberapa kasus berhasil dan lainnya tidak berjalan kembali dikarenakan faktor pemerintah. Jika melihat kembali dengan permasalahan yang peneliti ambil dalam penulisan skripsi ini penelitian terdahulu berguna memberikan gambaran dan pemetaan terhadap informan dan terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang akan dibahas peneliti dalam skripsi nantinya, sebab berdasarkan penelitian terdahulu perbaikan permukiman dan masyarakat melalui *Community Action Plan* telah berjalan namun setelah peneliti melakukan wawancara dan observasi terdapat permasalahan yang berasal dari sisi implementor dengan begitu peneliti menggunakan teori implementasi dengan melihat faktor pendukung dan penghambat.

1.5.2 Administrasi Publik

Seluruh tahap dalam proses pelaksanaan ketetapan yang sudah diambil merupakan pengertian dari administrasi. Pelaksanaan dari ketetapan tersebut pada umumnya dikerjakan oleh dua individu atau lebih dengan maksud mendapatkan tujuan yang telah ditentukan bersama. Pengertian ini dikutip dari Pasolong yang mengutip Sondang P. Siagian (2007:3)

Henry mendefinisikan Administrasi Publik yang dikutip dalam Mulyadi (2015 : 34) yaitu administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas dan efisiensi. Menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro definisi Administrasi Publik dikutip dari Syafii (2008:23) mengatakan terdapat 5 definisi, yaitu:

- 1) Administrasi publik merupakan suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan.
- 2) Administrasi Publik melingkupi ketiga cabang dalam pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan di antara mereka
- 3) Administrasi publik memiliki kontribusi yang penting dalam merumuskan kebijaksanaan pemerintah dan sebab itu ia merupakan proses politik.
- 4) Administrasi publik berkaitan erat dengan bermacam-macam kelompok swasta serta perorangan dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat.
- 5) Administrasi Publik dalam beberapa hal berbeda mengenai pengertiannya bila dibandingkan dengan administrasi perseorangan.

Menurut Maeshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Fox (dalam Keban, 2008:5) mengartikan administrasi publik ialah produksi barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani keperluan masyarakat sebagai konsumen. Administrasi publik mengarah pada *New Public Management* yang merupakan suatu kegiatan yang mirip dengan bisnis dalam menghasilkan pelayanan publik berupa barang dan jasa dan melihat masyarakat sebagai pelanggan, bukan warga negara

1.5.2.1 Paradigma Administrasi Publik

Administrasi sebagai sebuah disiplin ilmu telah mengalami beberapa kali pergeseran paradigma. Masing-masing paradigma ditandai berdasarkan “lokus” atau “fokus” di mana ilmu tersebut berada dan apa yang menjadi pembahasan penting dalam mempelajari ilmu administrasi publik. Adapun beberapa pergeseran paradigma tersebut menurut Nicholas Henry (dalam Keban, 2008: 31-33) adalah sebagai berikut:

1. Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi (tahun 1900 hingga 1926) tokohnya ialah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Paradigma ini menjelaskan tentang pemisahan antara politik dan administrasi.
2. Paradigma Prinsip – Prinsip Administrasi (tahun 1927 hingga 1937) tokohnya ialah Willoughby, Gullick dan Urwick. Pada tahap paradigma ini lokus menjadi tidak jelas dan fokusnya ada pada prinsip – prinsip manajerial, yaitu POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*) yang bersifat universal.

3. Paradigma Administrasi sebagai ilmu politik (tahun 1950-1970) tokohnya ialah Morstein, Marx dan Herbert Simon. Paradigma ini mengandung makna bahwa pelaksanaan prinsip – prinsip administrasi tidak bisa bebas nilai atau dengan kata lain administrasi publik sebagai ilmu politik memiliki lokus dalam birokrasi pemerintahan dan fokusnya menjadi kabur.

4. Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik (tahun 1956 hingga 1970), didalamnya terdapat pengembangan prinsip – prinsip manajemen secara ilmiah yang merupakan fokusnya, sedangkan lokusnya menjadi kabur.

5. Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi publik (tahun 1970 hingga sekarang), fokusnya adalah teori organisasi, manajemen, kebijakan publik dan lokusnya adalah masalah – masalah kepentingan publik.

Meskipun Nicholas Henry secara spesifik berpendapat ingin membedakan kelima paradigma tersebut berdasarkan “lokus dan fokus” yang terkandung di dalamnya, namun dari penamaan yang diberikannya tidak segera terlihat baik “lokus” (kecuali pada paradigmapertama yang langsung menunjukkan posisi administrasi yang terpisah dari politik), dan “fokus” dari kelima paradigma tersebut.

6. Paradigma Administrasi Publik sebagai Pemerintahan (tahun 1990 hingga sekarang), konsep ini bukanlah hal baru tetapi telah memperoleh makna dan aplikasi baru dari akhir 1980-an dan 1990-an. Hal ini dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan kekuasaan atau otoritas oleh para pemimpin politik untuk kesejahteraan warga negara atau subyek, proses yang kompleks dimana beberapa sektor masyarakat menggunakan kekuasaan, dan memberlakukan dan

menyebarkan kebijakan publik yang secara langsung mempengaruhi manusia dan kelembagaan. interaksi, dan pembangunan ekonomi dan sosial (Tamayao, 2014).

Paradigma ini dapat dikatakan mirip dengan NPM misal desentralisasi fungsi pemerintahan. Selanjutnya, kedua versi perubahan tersebut membuat beberapa rekomendasi yang kompatibel, dan bahkan saling melengkapi. Misalnya, gagasan dalam NPM tentang manajemen kinerja dan penekanan pada pengukuran keluaran dari pemerintah dapat memfasilitasi penggunaan aktor non-pemerintah untuk menyampaikan program.

Namun, beberapa sarjana percaya bahwa pendekatan tata kelola datang jauh kemudian dan menandai jeda penting dengan neoliberalisme. Misalnya, Archer (1994) berpendapat bahwa sementara neoliberalisme mengakui bahwa pasar adalah jawaban keseluruhan, pendekatan tata kelola tidak. Ini lebih mengakui pentingnya kolaborasi pemerintah dan sektor lain termasuk swasta dan masyarakat sipil atau sektor ketiga dalam penyediaan layanan (Ikeanyibe, 2016). Dalam hal ini, sementara NPM dapat dikatakan sebagai aliran administratif inti neoliberalisme, pemerintahan merupakan reaksi terhadap eksekusi dari pendekatan ini. Peters (2003, hlm. 18) memberikan perbedaan yang lebih jelas antara NPM dan paradigma Tata Kelola sebagai berikut: dalam dunia NPM penggunaan aktor non-pemerintah adalah untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan membatasi kekuasaan Negara. Dalam pendekatan tata kelola ada beberapa elemen efisiensi tetapi pembenaran utamanya adalah untuk melibatkan masyarakat sipil, meningkatkan partisipasi, dan mengakui kapasitas jaringan dalam masyarakat sipil untuk

menyediakan setidaknya tingkat manajemen diri tertentu di bidang kebijakan mereka.

Sebagaimana dicatat oleh Lane (1994) sebagaimana dikutip oleh Wu dan He (2009, hlm. 21), sementara berbagai paradigma “baru” dapat memperkenalkan dimensi baru, paradigma birokrasi terus memberikan landasan yang sangat diperlukan di lapangan. Oleh karena itu, orientasi tata kelola memberikan dimensi baru partisipasi dan kerja sama dengan berbagai jaringan. Oleh karena itu, pemerintah mengatur melalui kolaborasi birokrasi dan jaringan hierarkis untuk mencapai tidak hanya efisiensi tetapi juga nilai-nilai penting lainnya yang harus menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena itu, istilah *governance* digunakan untuk menggambarkan beberapa proses fundamental dari pemerintahan modern yang berbeda dari cara “pemerintah” beroperasi secara tradisional. Ini terdiri dari proses politik yang luas di mana partisipasi warga dan kelompok dalam kebijakan dan program pemerintah sangat penting (Ikeanyibe, 2016)

Selain pergeseran menurut Hendry tersebut, masih terdapat pergeseran paradigma administrasi publik menurut G. Shabbir Cheema (dalam Keban, 2008: 37 – 38) adapun pergeseran tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. *Old Public Administration*, yang memiliki orientasi kepada hierarki, keberlanjutan, ketidakberpihakan, standarisasi, legal regional, otoritas, dan profesionalitas.

2. *New Public Management*, yaitu penguatan pada penerapan prinsip – prinsip manajemen yang terkandung efisiensi dalam penggunaan sumber daya, efektivitas, serta memiliki orientasi kepada pelanggan dan lain – lain.

3. *New Public Service*, yang dihadapkan kepada prinsip fleksibilitas, pemberdayaan, inovasi, serta berorientasi hasil dengan basis kinerja.

4. *Good Governance*, suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan di mana urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola dengan adanya interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Paradigma ini mementingkan proses yang mana masyarakat ataupun kelompok dapat mengekspresikan kepentingannya.

Penjelasan mengenai perubahan paradigma administrasi publik khususnya yang berkaitan dengan manajemen menggambarkan perubahan orientasi administrasi publik dari waktu ke waktu yang berlangsung dengan cepat. Ada beberapa hal yang dapat diambil sebagai poin di sini, yang pertama adalah administrasi publik memiliki beberapa elemen penting yang berhubungan dengan pemerintah dan masyarakat umum (publik). Kedua, terdapat dua fokus dalam teori administrasi publik, yakni manajemen publik (pengelolaan) dan kebijakan publik. Denhardt & Derhardt (dalam Keban, 2008;37) berpendapat adanya perubahan paradigma pelayanan publik dari model administrasi publik tradisional (*Old Public Administration*) ke model manajemen publik baru (*New Public Management*) yang berakhir kepada model pelayanan publik baru (*New Public Service*).

1.5.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut William Dunn (dalam Dikson Silitonga, 2018: 49) ialah "*a complex pattern of interdependent collective choice, including decisions not act, made by governmental bodies and official*" yang dapat diartikan sebagai pola yang kompleks dari kumpulan berbagai pilihan yang saling

bergantung, termasuk keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh pemerintah dan pejabat terkait. Menurut Ealau dan Pewitt kebijakan publik ialah sebuah ketetapan yang berlaku dicirikan oleh perilaku yang berulang, perilaku berulang ini berasal dari pembuat maupun pelaksana dari kebijakan tersebut.

Sedangkan menurut Titmuss kebijakan ialah prinsip-prinsip atau aturan yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu. Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (dalam Dikson Silitonga, 2018 : 49) yaitu "*what government do, why they do it, and what difference it makes*" yang dapat diartikan kebijakan publik adalah sesuatu yang pemerintah lakukan atau tidak pemerintah lakukan, mengapa pemerintah melakukan itu, dan perubahan apa yang dapat dihasilkan.

Selanjutnya menurut Nugroho R. kebijakan publik ialah aturan yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat yang sifatnya harus ditaati dan mengikat bagi seluruh masyarakat. Pelanggaran yang dilakukan atas kebijakan publik tersebut maka akan diberikan sanksi yang diberikan oleh lembaga yang memiliki tugas untuk memberikan sanksi (dalam Taufiqurokhman, 2014 : 07). Kebijakan publik memiliki kaitan yang erat dengan administrasi negara, hal ini dapat dilihat melalui aktor yang berperan. Ketika aktor publik memberikan koordinasi terkait seluruh kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat maka melalui kebijakan publik para aktor ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Nugroho turut memberikan pendapat mengenai kebijakan publik yaitu keputusan yang dibuat oleh negara sebagai bentuk strategi untuk mewujudkan tujuan negara.

Nugroho menjelaskan kebijakan publik dalam pelaksanaan kenegaraan dan pemerintahan dibagi dalam tiga tahap yang pertama yaitu formulasi kebijakan, formulasi kebijakan membahas bagaimana merumuskan suatu kebijakan, lalu yang kedua implementasi, implemementasi memiliki arti bagaimana kebijakan publik tersebut nantinya akan diimplementasikan, dan yang terakhir yaitu evaluasi, pada tahap ini kebijakan publik dievaluasi keberjalannya selama suatu periode tertentu (dalam Taufiqurokhman, 2014 : 10)

Kebijakan dapat didefinisikan sesuai teori yang mengikutinya, antara lain:

- T. Kelembagaan. Teori ini melihat kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan, di mana pemerintah dan strukturnya adalah pusat kegiatan politik
- T. Kelompok. Teori ini melihat kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu
- T. Elit. Pada teori ini kebijakan pemerintah dipandang sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah
- T. Rasional. Teori ini memiliki pandangan terhadap kebijakan sebagai sarana mencapai tujuan melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap
- T. Inkremental. Kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lalu.
- T. Permainan. Maksudnya adalah kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi-situasi yang bersaing

- T. Campuran. Teori ini merupakan gabungan teori model rasional komprehensif dan teori inkremental.

1.5.4 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Tanpa adanya implementasi kebijakan tidak dapat berjalan. Melalui implementasi aktivitas atau kegiatan yang dilakukan akan dapat dipantau pelaksanaannya dan dampak yang ditimbulkan oleh pembuat kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2012 : 164) mengemukakan bahwa Implementasi Kebijakan berkenaan dengan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diarahkan untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lester dan Stewart (2000 : 145) menyatakan bahwa Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Van Meter dan Van Horn mengembangkan Model Proses Implementasi Kebijakan (Agostino, 2006). Keduanya meneguhkan pendirian bahwa perubahan, kontrol, dan kepatuhan dalam bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi. Keduanya mengembangkan tipologi kebijakan menurut: (i) jumlah perubahan yang akan dihasilkan, dan (ii) jangkauan atau ruang lingkup kesepakatan mengenai tujuan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983: 5) terdapat dua persepektif dalam menganalisis implementasi, pertama perspektif administrasi publik dan kedua

perspektif ilmu politik. Pada perspektif administrasi publik implementasi dilihat sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien. Namun kemudian berdasarkan berbagai penelitian administrasi negara menunjukkan bahwa agen administrasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh perintah resmi namun turut dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok kepentingan, anggota lembaga legislatif, dan berbagai faktor dalam lingkup politik.

Pada perspektif ilmu politik berarti mendapat dukungan dari pendekatan sistem terhadap kehidupan politik. Perspektif ini berfokus pada pertanyaan dalam analisis implementasi yaitu seberapa jauh konsistensi antara *output* kebijakan dengan tujuannya.

Teori dan Model Implementasi

Teori dan model implementasi terbagi atas tiga generasi yaitu :

1. Model *top-down* atau *command control*
2. Model *bottom-up*
3. Model *hybrid*

a. Model top-down

Van Meter dan Van Horn merupakan aktor pertama yang merumuskan model implementasi model *top down*. Mereka berpendapat bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik yang ada, aktor pelaksana dan kinerja kebijakan publik (Nugroho, 2003 : 167). Pendekatan implementasi *top-down* merupakan pendekatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi (Nugroho, 2003 : 167). Pada

pendekatan ini, lembaga publik berhak memberikan sanksi bagi yang menolak melaksanakan dan tidak memberikan insentif bagi yang menjalani. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

Dalam model pendekatan *top down* terdapat variable variabel yang mempengaruhi implementasi

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Ukuran dan tujuan kebijakan itu harus realistis dan sesuai sosial budaya

2. Sumber daya Keberhasilan

Sumber daya yang dikelola meliputi manusia, alam, dan informasi.

3. Karakteristik Agen Pelaksana Pusat

perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya..

4. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, kesalahan kecil akan terhindari jika berkoordinasi dengan baik.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Merilee. S Grindle turut mengembangkan teori ini, teorinya yang terdapat dalam Abdul Wahab (1997), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni

- a. Isi kebijakan (*content of policy*)
- b. Lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Variabel isi kebijakan ini mencakup:

1. isi kebijakan;
2. manfaat yang diterima oleh target kelompok;
3. perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
4. ketepatan program;
5. kejelasan implementor
6. dukungan sumber daya yang memadai

Edwards III mengemukakan terdapat empat variable yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi, menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu :

a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian, hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/nebdua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan

c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah

2. Sumber daya

a. Staf, sumberdaya utama dalam mengimplementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi, dalam mengimplementasikan kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka jalankan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi di sisi lain, efektivitas dan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelakasan demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah factor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksana suatu kebijakan publik. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi harus memiliki kemampuan untuk melaksankannya.

a. Efek disposisi, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus bagi pada kepentingan warga

b. Melakukan pengaturan birokrasi (*Staffing the bureaucracy*), implementasi kebijakan harus dilihat dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi sesuai dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya. Selain itu pengatur birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode bypassing personil.

c. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan manipulasi insentif. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik

4. Struktur birokrasi

a. Membuat standar operating prosedur (sop) yang lebih fleksible. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/birkrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegitannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).

b. Melakukan fragmentasi, untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing

Variabel-variabel ini bekerja secara stimulant dan saling berinteraksi, variable-variabel ini dapat menjadi factor pendorong ataupun factor penghambat dari iplementasi kebijakan publik.

b. Model bottom-up

Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya ditataran rendah. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga nir laba kemasyarakatan

Model-model tersebut sebagai berikut :

1. *The systems management model*
2. *The organizational development model*
3. *The bereaucratic process model*
4. *The conflict and bargaining model.*

Ahli kebijakan yang lebih memfokuskan model implementasi kebijakan *bottom up* adalah Adam Smith. Menurut Smith dalam Islamy (2004), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memamandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.

c. Model *Hybrid*

Model *hybrid* biasa disebut juga model campuran. Artinya kolaborasi pemerintah dan partisipatif masyarakat. Perkembangan awal sintesis dikemukakan oleh Ricard Elmore (1985) yang menyatakan bahwa dalam kerangka analisi dan implementasi diperlukan pemetaan mundur (*bottom up*) dan pemetaan maju (*top down*) (Parsons, 2005 : 490)

Dalam pendekatan *hybrid*, keberhasilan implementasi program tergantung pada pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Selain harus selalu mulai dengan pertimbangan mengenai instrumen kebijakan dan sumber daya yang tersedia bagi perubahan kebijakan, para pembuat kebijakan juga harus mengidentifikasi struktur insentif bagi para pelaksana dan kelompok-kelompok target kebijakan (Helga Puzl dan Oliver Treib (dalam Fischer et al., 2007:95). Bagi Sabatier (1986), pendekatan hibrida muncul dalam kerangka advokasi kebijakan yang sama dengan pendekatan bawah-atas ketika analisis dimulai dari masalah kebijakan dan berlanjut dengan rekonstruksi strategi dari aktor yang terkait dalam rangka memecahkan masalah.

Salah satu model *hybrid* dikemukakan oleh Randall B. Ripley and Grace A. Franklin. Model ini menjelaskan 3 variabel yang berkaitan, diantaranya :

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku. Perspektif pertama (*compliance perspective*) memahami keberhasilan implementasi sebagai kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program.

2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi. Bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi

3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi/pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki dari semua program-program yang dikehendaki.

1.5.5 Peningkatan Kualitas Permukiman dan Masyarakat

Pelaksanaan penataan permukiman dan masyarakat dipayungi oleh Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat. Pada Kepgub tersebut memuat 21 kampung yang harus dibenahi yang tersebar di Kota Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan di mana di dalamnya terdapat Kampung Akuarium.

Penataan permukiman ini menggunakan metode *Community Action Plan* (CAP), sesuai dengan namanya, *community*, penataan permukiman ini melibatkan masyarakat sehingga terciptanya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam tahap perencanaan permukiman. Perencanaan permukiman ini di dasari atas

kemauan warga dan cita-cita warga terhadap permukimannya kelak dan tetap memperhatikan ciri khas serta potensi yang dimiliki wilayah permukiman tersebut. Sesuai dengan nama program ini yaitu Penataan Permukiman dan Masyarakat, perencanaan penataan permukiman yang dilakukan tidak terbatas pada aspek fisik lingkungan dan bangunan saja namun turut merencanakan pemberdayaan pada aspek sosial budaya dan ekonomi yang tentunya dengan memanfaatkan serta memaksimalkan potensi lingkungan yang mereka miliki.

Selain Kepgub Nomor 878 Tahun 2018 terdapat Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Terpadu. Kedua peraturan tersebut sama-sama memayungi untuk dilaksanakannya peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat namun perbedaan terdapat pada penetapan lokus, jika Kepgub No. 878 Tahun 2018 mengatur peningkatan kualitas permukiman pada 21 Kampung maka Pergub No.90 Tahun 2018 mengatur peningkatan kualitas permukiman pada RW-RW kumuh yang ada di Jakarta, sebanyak 445 RW kumuh yang termuat pada Pergub No.90, selain memuat penetapan RW kumuh yang harus dibenahi, Pergub No.90 Tahun 2018 juga mengatur pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat.

Peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat memiliki tujuan berupa:

1. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang layak dan keamanan bermukim bagi masyarakat kampung.

2. Pemenuhan prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peningkatan layanan sarana dan prasarana permukiman; dan
4. Terpenuhinya aksesibilitas dan fasilitas publik.

Pada pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat terdapat tiga tahapan pelaksanaan yaitu

1. *Community Action Plan (CAP)* merupakan tahap perencanaan yang dilakukan menggunakan *Community Action Plan* yang berarti perencanaan berbasis masyarakat dengan output dokumen perencanaan penataan kampung,
2. *Collaborative Implementation Program (CIP)* merupakan bentuk implementasi dari CAP. Setelah perencanaan sudah dibuat maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan CIP, namun CIP hanya terbatas pada lingkungan yang sudah memiliki rumah dan pelaksanaan CIP dilakukan oleh SKPD terkait. *output* tertatanya aspek fisik
3. *Monitoring and evaluation*. Kegiatan *monitoring and evaluation* dilakukan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi serta memberikan laporan mengenai keberjalanan program agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

Pada pelaksanaannya terdapat tiga aspek untuk meningkatkan kualitas permukiman dan masyarakat yaitu

1. Fisik,
2. Sosial dan budaya,
3. Ekonomi.

Berdasarkan arahan pada Pergub No. 90 Tahun 2018, untuk peningkatan aspek fisik akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta, sementara untuk aspek sosial budaya dan ekonomi akan dikerjakan oleh SKPD terkait, meskipun begitu, tetap, Peningkatan Kualitas Permukiman dan Masyarakat merupakan program yang dinaungi oleh Dinas PRKP DKI Jakarta.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1. 6
Operasionalisasi Konsep

Konsep	Fenomena
<p>Implementasi Program Peningkatan Kualitas Permukiman dan Masyarakat di Kampung Akuarium adalah suatu rangkaian proses kegiatan berupa <i>Community Action Plan</i>, pelaksanaan pembangunan pada aspek fisik, sosial, dan ekonomi, serta kegiatan <i>monitoring and evaluation</i> agar terpenuhinya kebutuhan hunian yang layak dan aman bermukim bagi masyarakat di Kampung Akuarium.</p>	<p>Proses kegiatan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman melalui tiga tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Community Action Plan (CAP)</i> merupakan tahap perencanaan berbasis masyarakat. Pada kegiatan ini masyarakat dituntut untuk aktif dan dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk membuat perencanaan mengenai permukimannya kelak2. Pembangunan aspek fisik, sosial budaya, dan ekonomi. Setelah perencanaan yang dibuat pada tahap CAP kemudian direalisasikan pada tahap ini. Perealisasian dilaksanakan berdasarkan rencana yang telah dibuat yang tertera pada dokumen CAP.3. <i>Monitoring and Evaluation</i>. Pada tahap ini dilakukan pengawasan dan evaluasi untuk menjaga keberjalanan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan evaluasi dilakukan untuk mengaji bagaimana keberjalanan seluruh kegiatan sehingga dapat dijadikan <i>input</i> untuk mengerjakan program ini di kampung lainnya

Konsep	Fenomena
<p>Faktor-faktor pendorong dan atau factor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan antara lain : struktur birokrasi, disposisi, komunikasi, dan sumber daya</p>	<p>Terdapat faktor-faktor yang dapat menjadi pendorong dan penghambat pada implementasi program CAP dalam penataan kawasan permukiman terpadu yaitu:</p> <p>Terdapat faktor-faktor yang dapat menjadi pendorong dan penghambat pada implementasi program CAP dalam penataan kawasan permukiman terpadu yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur birokrasi. berkenaan dengan pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, yang akan berpengaruh pada pencapaian tujuan kebijakan 2. Disposisi. Berkaitan mengenai sikap pelaksana terhadap kebijakan yaitu sikap para pelaksana program CAP dalam penataan kawasan permukiman terpadu di Kampung Akuarium berkenaan dengan sikap penerimaan atau penolakan, juga dengan komitmen yang dimiliki para pelaksana program ini. 3. Komunikasi adalah penyaluran informasi dari para stakeholders ke masyarakat Kampung Akuarium dan dari masyarakat Kampung Akuarium kepada <i>stakeholders</i> dalam penyam. Faktor komunikasi berpengaruh dalam menciptakan pengertian atau pemahaman yang sama di antara para pelaku kebijakan, yang kemudian berpengaruh pada sikap, tindakan ataupun perilaku, dan kemudian memengaruhi produktivitas kerja.pada komunikasi terdapat tiga aspek yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi 4. Sumber daya berkaitan dengan segala jenis sumber yang dapat membantu dan mendorong pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat. Baik dari sisi sumber daya manusia yang dinilai berdasarkan kompetensi serta sumber daya dalam hal pendanaan

1.7 Argumen Penelitian

Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian menjadi magnet bagi masyarakat Indonesia untuk mencoba memperbaiki nasibnya. Banyak masyarakat berbondong-bondong untuk pindah di Jakarta yang pada akhirnya meningkatnya jumlah penduduk dan menimbulkan permukiman kumuh akibat keterbatasan lahan yang tersedia.

Gubernur terpilih untuk periode 2017-2022 membuat program politik pada masa pencalonannya yaitu berupa perbaikan permukiman bagi kampung-kampung dan RW kumuh, terlebih pada kampung-kampung yang digusur pada masa pemerintahan sebelumnya. Pada tahun 2018 dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 90 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat. Peraturan Gubernur tadi memiliki fungsi sebagai payung hukum untuk pelaksanaan perbaikan permukiman di Jakarta. Salah satu program yang terdapat di dalam Pergub tersebut adalah *Community Action Plan* yang akan diterapkan pada 21 kampung terpilih, salah satunya Kampung Akuarium di Jakarta Utara.

Pada pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Permukiman dan Masyarakat ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi saat ini yang sedang berlangsung di lapangan. Pertama ketidaksesuaian keberjalanan *Community Action Plan* yang seharusnya dibuat oleh konsultan

berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah serta pelaksanaan dua aspek lainnya yaitu aspek social budaya dan ekonomi yang berbeda antara pelaksanaan dengan napa yang direncanakan di dalam dokumen CAP Kelurahan Penjaringan.

Hingga saat ini baik masyarakat maupun pemerintah menyoroti Kampung Akuarium hanya pada aspek fisik lingkungan yang sebelumnya rumah mereka digusur dan rata dengan tanah namun saat ini sudah dan sedang dibangun kampung susun di lokasi yang sama dengan permukiman sebelumnya. Pada saat

Selain itu berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu terdapat 21 kampung yang akan dibenahi menggunakan *Community Action Plan* namun hingga tahun 2021 baru terbangun satu kampung yaitu Kampung Akuarium

Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode implementasi untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Permukiman dan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan aman serta melihat factor pendorong dan penghambat apa saja di dalamnya. Sehingga hasil temuan dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi *stakeholders* dan menjadi acuan untuk penerapan program Peningkatan Kualitas Permukiman dan Masyarakat di kampung lainnya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Menurut Sugiyono (2008) secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2008: 11) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Penggunaan deskriptif kualitatif oleh peneliti karena bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai situasi, berbagai kondisi atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian. Penelitian kualitatif dipilih karena peneliti ingin mengeksplor lebih dalam untuk mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana implementasi peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat di Kampung Akuarium.

1.8.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan tempat atau wilayah di mana penelitian akan dilaksanakan. Fokus dari penelitian ini adalah program peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat sehingga lokus dari penelitian ini adalah Kampung Akuarium, Jakarta Utara.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam hal ini adalah individu atau kelompok yang diharapkan dapat memberikan informasi untuk menerangkan fenomena yang diteliti. Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, pada penelitian ini

menggunakan metode *purposive sampling*, informan dipilih berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, yaitu individu-individu yang memiliki wawasan dan kewenangan dalam pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman dan Masyarakat di Kampung Akuarium seperti masyarakat Kampung Akuarium, Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa pernyataan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti, tulisan berupa temuan dari hasil observasi serta informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait penelitian ini baik dalam bentuk kata-kata, table, dan gambar sebab penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga data merupakan penjabaran menggunakan kalimat yang menjelaskan kejadian yang terjadi pada penelitian

1.8.5 Sumber Data

Data penelitian kualitatif merupakan data yang berupa teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol dengan menggambarkan atau mempresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan serta kejadian tertentu yang dijabarkan dalam catatan lapangan (transkrip).

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dengan cara langsung dari informan. Teknik pengambilan data primer dapat melalui wawancara atau pengamatan langsung di lapangan. Perolehan data primer masih berupa informasi mentah yang masih memerlukan analisis lebih lanjut. Wawancara serta observasi

dikerjakan secara langsung terhadap individu maupun instansi dengan keterlibatan dengan informan terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dengan cara tidak langsung. Data yang didapatkan berbentuk dokumen berupa artikel-artikel berasal dari internet mengenai fokus penelitian dan juga buku ataupun literatur yang terkait. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder untuk mendukung pengambilan data. Data ini berupa dokumen, laporan-laporan, buku, jurnal, skripsi ataupun tesis, foto dan studi kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian tentang peningkatan kualitas dan permukiman masyarakat.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data menggunakan cara mempelajari buku, makalah yang bermanfaat untuk memperoleh informasi yang sejalan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga dijadikan pedoman bagi penganalisis data primer dan untuk mendukung dan memperkuat pembahasan masalah.

2. Penelitian Lapangan Penelitian di lapangan dilaksanakan dengan mengadakan penelitian terhadap objek yang diamati, melalui :

a. Wawancara mendalam

Wawancara adalah proses penghimpunan data berupa informasi yang diperoleh secara langsung dari informan. Wawancara menjadi sebuah proses

komunikasi dan interaksi. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor, yaitu informan dan pewawancara, tema penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara (Singarimbun dan Effendi, 2008:192). Wawancara dilaksanakan secara lebih lanjut, hal ini diperlukan agar informasi yang diperoleh semakin terinci. Wawancara lebih lanjut dilaksanakan langsung kepada seorang informan atau dapat berupa *focus grup discussion*, tergantung pada awal perjanjian dengan informan, pada penelitian ini, wawancara dilaksanakan dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga dapat memungkinkan responden untuk mengutarakan jawaban secara lebih luas.

b. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian (Widoyoko, 2014 : 46). Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat kejadian-kejadian yang terjadi di lokus penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data melalui dokumen-dokumen. Desain dokumentasi digunakan guna mengumpulkan data dari sumber dokumen yang dimungkinkan membantu bahkan dapat berlawanan dengan hasil setelah wawancara. Cara ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang berasal dari arsip atau dokumen. Desain dokumentasi dilakukan guna memenuhi informasi yang didapat dari wawancara. Informasi yang didapatkan dapat berupa rekaman dan tulisan seperti laporan resmi, notulensi, catatan harian dan buku buku.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Afifudin (2009;145) mendefinisikan bahwa teknik analisis data ialah suatu proses mengatur data, mengategorikan dan satuan uraian dasar, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, menerjemahkan, dan menganalisis data menggunakan metode penelitian kualitatif.

1. Reduksi Data

Berdasarkan penelitian, data yang diperoleh di lapangan dimasukkan ke dalam uraian laporan terperinci dan lengkap. Data serta laporan penelitian di lapangan kemudian diolah dan direduksi serta dirangkum, lalu data-data tersebut dipilih hal yang penting saja. Hal ini bertujuan agar dapat terfokuskan, kemudian dipilih sesuai dengan tema. Reduksi data dilakukan secara berkala pada saat proses penelitian dilaksanakan. Tahapan ini harus disederhanakan, data yang tidak digunakan dipisahkan, hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan kemudahan saat penyajian data dan berguna menarik kesimpulan yang bersifat sementara

2. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan agar mempermudah peneliti guna melihat gambaran secara komprehensif. Fase ini merupakan suatu tatanan ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga nampak terlihat secara jelas dan utuh. Data tersebut kemudian dipisah dan disisikan guna disortir yang kemudian akan ditata sesuai dengan jenis untuk diperlihatkan supaya sejalan dengan persoalan yang sedang dihadapi, termuat kesimpulan-kesimpulan sementara yang didapat saat waktu data sedang direduksi.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data ialah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pola-pola yang ada dalam penyajian data. Dalam laporan tersebut terdapat hubungan antara data dan didukung oleh berbagai teori. Kemudian peneliti memiliki gambaran penuh terhadap penelitian yang sedang ia lakukan, kemudian peneliti dapat menyimpulkan fenomena-fenomena yang ada sebagai temuan baru. Peneliti mengambil intisari dari penelitian ini melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Dapat dikatakan, masing-masing kesimpulan senantiasa dapat selalu dilaksanakan verifikasi selama penelitian sedang berlangsung dengan melibatkan interpretasi peneliti. Analisis data adalah kegiatan logis, data kualitatif berasal dari sudut pandang tertentu terhadap fenomena yang sedang terjadi, terdapat beberapa data kualitatif yang berisikan dari angka-angka guna mendukung adanya persentase yang memiliki hubungan antara data yang berkaitan dengan pokok bahasan. Guna memperoleh suatu hubungan penyilangan yang memberikan klarifikasi pada analisis implementasi peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat di Kampung Akuarium Jakarta Utara.

Ketiga unsur saling berinteraksi hingga didapat kesimpulan akhir yang benar, jika kesimpulan belum memadai maka harus dilakukan pengujian ulang, yakni dengan mencari kembali beberapa data yang ada di lapangan, kemudian dicoba guna diinterpretasikan dengan fokus yang lebih jelas. Dengan demikian, analisis data yang telah didapat merupakan proses interaksi yang melibatkan tiga unsur analisis dengan pengumpulan data dan bagian dari siklus hingga dengan kegiatan penelitian berakhir

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data merupakan kelengkapan dan keakuratan data, keakuratan data berhubungan antara ketepatan waktu dengan konsistensi. Kelengkapan sendiri memiliki arti *output* dari proses pengolahan data yang mewakili keadaan sebenarnya. Kelengkapan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendeskripsikan suatu entitas atau semua nilai yang seharusnya dikumpulkan.

Menurut Mark Mosley kualitas data merupakan tingkatan data yang menyebutkan keakuratan suatu data, lengkap, terkini, dan konsisten sejalan dengan kebutuhan. Keakuratan mengandung makna seberapa jauh data tersebut mengandung kebenaran, dapat diandalkan dan data yang diperoleh sesuai dengan kondisi nyata. Ketepatan waktu yaitu aspek dari data, memiliki arti dimensi terkini, tidak lekang oleh waktu, dan volatilitas. Menurut Afifuddin (2009: 143) triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Menurut Patton dalam Afifuddin (2009: 143) terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan:

- a. Triangulasi data menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.
- b. Triangulasi pengamat adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, misalnya pembimbing

bertindak sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

c. Triangulasi teori Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat.

d. Triangulasi metode Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi.